

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU:

- Akis, Mimi Rosmidi & Imam Koeswahyono, 2010, *Konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Hukum Agraria*, Setara Press, Malang.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Kesebelas, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti, et.al/dkk, 1994, *Condominium dan Permasalahannya, Suatu Rangkuman Materi Perkuliahan*, Elips Proyect-FH-UI, Jakarta.
- Koeswahyono, Imam, 2004, *Hukum Rumah Susun, Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT Edisi Revisi*, Karya Media, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2014, *Hukum Perumahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Rumah Susun & Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjosumarto, Parwoto, 2001, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Yani, Ahmada & Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **2. UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 No.23 Tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)* terjemahan Subekti;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2611);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor  
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat  
Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3746);

### **3. PERATURAN KEPALA DAERAH:**

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang  
Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun (Berita Daerah Kota  
Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8).

### **4. PERATURAN DILUAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989  
tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta  
Pemisahan Rumah Susun;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989  
tentang Bentuk dan Tatacara Pembuatan Buku Tanah Serta  
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang  
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun;

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994  
tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

## 5. PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor:  
02/PKPU/2009/PN.Niaga.Smg juncto Nomor:  
13/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg tanggal 28 Desember 2009.

## 6. SKRIPSI

Saputra, Haris Surya, 2013, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Kepentingan Kreditor Konkuren Dalam Kasus Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. Saphir Yogya Super Mall)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## 7. INTERNET:

[Http://properti.bisnis.com/read/20131220/107/193576/uu-permukiman-dan-rusun-tuntut-dukungan-peraturan-derah](http://properti.bisnis.com/read/20131220/107/193576/uu-permukiman-dan-rusun-tuntut-dukungan-peraturan-derah) diakses pada tanggal 5 Februari 2015 pukul 15.00.